

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN DAGANG INTERNASIONAL

Kentoko Dimitri Widigdy, Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S, Heru Saputra
Lumban Gaol, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Corresponding author: s120119374@student.ubaya.ac.id

Abstract - The Indonesian government's policy to prohibit the export of nickel ore since 2020 has generated significant legal consequences in international trade, particularly in relation to the performance of international commercial contracts. This article examines whether the nickel export ban may be legally qualified as force majeure within the framework of international trade agreements. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, with particular reference to the Indonesia–European Union dispute at the World Trade Organization (DS592). The analysis demonstrates that the export ban constitutes an act of state that may fulfill the elements of force majeure, provided that it meets the criteria of unpredictability, externality, and causality under international contract law instruments such as CISG Article 79 and UNIDROIT PICC Article 7.1.7. The WTO ruling against Indonesia does not automatically negate the application of force majeure in private contractual relations. Therefore, the nickel export ban can be considered a valid ground for excusing non-performance in international trade contracts, depending on the specific contractual clauses agreed upon by the parties.

Keywords: act of state; force majeure; international trade contract; nickel export ban; WTO

Abstrak - Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dalam perdagangan internasional, khususnya terhadap pelaksanaan perjanjian dagang internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat dikualifikasikan sebagai force majeure dalam perjanjian dagang internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya sengketa Indonesia–Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui perkara DS592. Hasil analisis menunjukkan bahwa larangan ekspor nikel merupakan bentuk act of state yang dapat memenuhi unsur force majeure sepanjang memenuhi kriteria tidak terduga, berada di luar kendali para pihak, dan memiliki hubungan kausal dengan tidak terlaksananya prestasi. Putusan WTO yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan GATT 1994 tidak serta-merta menghilangkan karakter force majeure dalam hubungan kontraktual privat. Dengan demikian, larangan ekspor bijih nikel dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab kontraktual dalam perjanjian dagang internasional, bergantung pada klausula kontrak yang disepakati para pihak.

Kata kunci: act of state; force majeure; kontrak dagang internasional; larangan ekspor nikel; WTO

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia (Kementerian ESDM, 2019). Nikel memiliki peranan strategis dalam industri global, khususnya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik dan industri baja nirkarat. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mendorong industrialisasi nasional, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020.